



REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENDIKBUDRISTEK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KULTUR, AGAMA DAN KEMAHASISWAAN

RENCANA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali 2018-2023, dengan mempertimbangkan pokok-pokok arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rancangan Akhir Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 memuat rancangan program dan kegiatan serta pendanaannya mempertimbangkan kerangka kebijakan pendanaan dan pagu indikatif untuk penyusunan awal RKPD Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan acuan tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merupakan wujud dari pola perencanaan teknokratik dan partisipatif sehingga menciptakan sebuah komitmen perencanaan untuk dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yang didukung oleh mitra kerjanya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Pada akhirnya dengan disusunnya Rancangan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 ini diharapkan menjadi pedoman untuk mewujudkan sinergitas, keselarasan, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi capaian indikator kinerja Renstra serta sebagai panduan untuk pelaksanaan program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

KEPALA DAERAH
LEMBANG DAERAH
REP. INDONESIA TAHUN 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2021	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.	28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
2.4 Kebijakan Renja 2023.....	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1 Telaahan Terhadap Rencana Kerja Pemerintah T.A 2023.....	40
3.2 Telaahan Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah T.A 2023.....	40
3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	53
3.4 Program dan Kegiatan	53
BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	66
BAB V PENUTUP	82
5.1 Catatan Penting.....	82
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	83
5.3 Tindak Lanjut.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Riset dan Inovasi Daerah.....	9
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali s/d Tahun 2021.....	19
Tabel 2.3	Kinerja Pelayanan Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah sampai Tahun 2021.....	30
Tabel 2.4	Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2021.....	31
Tabel 2.5	Identasi Kebutuhan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023.....	37
Tabel 3.1	Target Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali..	56
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	56
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Infografis Struktur Anggaran BRIDA Tahun Anggaran 2021.....	8
Gambar 2.2	Rancangan Struktur Program Anggaran BRIDA Tahun 2023.....	36
Gambar 3.1	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1.....	45
Gambar 3.2	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2.....	46
Gambar 3.3	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3.....	47
Gambar 3.4	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4.....	49
Gambar 3.5	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5.....	50
Gambar 3.6	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Bidang Prioritas Pembangunan Infrastruktur.....	52
Gambar 3.7	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Bidang Prioritas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.....	53
Gambar 3.8	Posisi Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Bali Dalam RPJMD SB 2018-2023.....	55
Gambar 3.9	Orientasi Pelaksanaan Kerisetan BRIDA Provinsi Bali.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sesuai dengan tahapan penyusunan Renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa fungsi dari perencanaan adalah memberikan pedoman, pegangan dan arah, serta memudahkan pengawasan dan evaluasi yang teratur serta sebagai alat koordinasi. Karenanya, sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang

menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah,

Tahapan Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah, serta untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Adapun Rancangan Renja Perangkat Daerah akan dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan, dan disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Sesuai dengan kedudukannya, Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah unsur fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dalam penyelenggaraan tugasnya mempunyai fungsi : perumusan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 memuat program/kegiatan perencanaan terkait urusan Pemerintahan Daerah dibidang urusan Penelitian dan Pengembangan,

yang berisikan tentang informasi rancangan rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran dan rancangan pendanaannya dengan mempertimbangkan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tupoksinya, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 100);
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 2);

22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023

1.3 Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebagai pedoman untuk mewujudkan sinergitas, keselarasan, dan konsistensi antara perencanaan penganggaran program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA dan DPA Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 adalah :

- 1) Penjabaran Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023
- 2) Menyusun rancangan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 beserta pagu inidkatif pendanaannya.
- 3) Sinkronisasi dan sinergisitas program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 berdasarkan hasil saran/masukan para *stakeholder* terkait Dalam Forum Perangkat Daerah (FPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rancangan akhir Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Desa Provinsi Bali menguraikan pokok bahasan serta susunan garis besar isi dokumen, yang memuat :

- a) Pendahuluan;
- b) Hasil Evaluasi Renja Tahun 2021;
- c) Tujuan dan Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- d) Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023;
- e) Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran serta indikator Sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, dirumuskan strategi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Strategi yang dimaksud merupakan langkah yang berisikan program dan kegiatan sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Untuk periode perencanaan Tahun 2021, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali telah merumuskan Rencana Kerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan, yang tentunya senantiasa memperhatikan paradigma perencanaan pembangunan yang tentunya tidak akan berjalan statis, namun dinamis seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan penyesuaian dalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendanaannya.

A. Evaluasi Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021;

Rencana Kerja Urusan Penelitian Dan Pengembangan diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 26.160.505.471,00 (dua puluh enam milyar seratus enam puluh juta lima ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) pada rencana pos belanja langsung APBD Induk T.A 2021. Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Sasaran Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta Meningkatnya Pelayanan Sektor Publik yang didukung 2 (empat) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, sebagai berikut:



Gambar 2,1
Infografis Struktur Anggaran BRIDA Tahun Anggaran 2021

Namun demikian, telah dilaksanakan *Refocussing* dan Rasionalisasi anggaran kegiatan dalam mendukung percepatan penanganan pandemi COVID-19. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan upaya untuk dapat tetap mencapai target secara optimal telah dilaksanakan:

1. melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan rutin/operasional yang tidak *urgent*;
2. berkoordinasi dengan perguruan tinggi terkait kajian-kajian yang dapat difasilitasi sesuai tema riset yang telah diagendakan;
3. melanjutkan kegiatan yang telah berkontrak dan berjalan pada T.A 2022

Rasionalisasi Anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2021 mencapai Rp.4.939.745.616,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah) sehingga terjadi perubahan belanja dalam RKPD – Perubahan Tahun 2021 menjadi Rp. 21.220.759.855,00 (dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima rupiah).

A.1 Program Urusan Daerah

Urusan Penunjang Urusan Pemerintah diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.220.759.855,00 dengan rincian.

- 1. Belanja Operasi : Rp. 20.602.061.855,00
- a. Belanja Pegawai : Rp. 9.194.317.264,00
- b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 11.407.743.791,00
- 2. Belanja Modal : Rp. 618.698.800,00

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini guna mendukung Program Prioritas Provinsi Bali.

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Sasaran Prioritas Daerah, yakni Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 program, 9 kegiatan dan 29 sub kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 2.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Riset dan Inovasi Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 3. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa 4. Pengelolaan Data

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Kelitbangan dan Peraturan 5. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
		2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 2. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 3. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan 4. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
		3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan T.A 2021

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp12.750.696.555,00 bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target nilai 80, realisasi capaian kinerja 80 dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.834.498.807,00 (92,81%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan target kinerja sebesar 17 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 29.058.250,00. Realisasi kinerja sebesar 17 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.632.450,00 (77,89%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 22.883.750,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 20.035.000,00 (87,55%) dan realisasi kinerja 12 dokumen.
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja 5 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 6.174.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.597.500,00 (42,07%) dan realisasi kinerja 5 dokumen.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen Realisasi Administrasi Keuangan yang diselesaikan dengan target kinerja 4 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 9.198.909.064,00. Realisasi kinerja sebesar 4 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.476.564.188,00 (92,15%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 42 dokumen dan anggaran sebesar Rp 9.191..257.264, realisasi anggaran sebesar Rp 8.469.466138,00 (92,15%) dan realisasi kinerja 42 dokumen.
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target kinerja 600 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 5.993.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 5.582.150,00 (93,14%) dan realisasi kinerja 600 dokumen.
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan target kinerja 5 laporan dan anggaran sebesar Rp. 1.385.200,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.269.250,00 (91,63%) dan realisasi kinerja 4 laporan.
 - 4) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan dan Pemeriksaan, dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 273.600,00, realiasasi anggaran Rp. 246.650,00 (90,15) dan realisasi kinerja 1 dokumen.

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 6 Jenis dan anggaran sebesar Rp. 331.275.525,00. Realisasi kinerja sebesar 6 Jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp. 264.357.925,00 (79,80%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 12 jenis dan anggaran sebesar Rp. 24.041.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 23.285.400,00 (96,86%) dan realisasi kinerja 12 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 33 jenis dan anggaran sebesar Rp. 44.731.500,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 40.884.050,00 (91,40%) dan realisasi kinerja 33 jenis.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 10 jenis dan anggaran sebesar Rp. 135.575.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 106.342.000,00 (78,44%) dan realisasi kinerja 10 jenis.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 4 jenis dan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 9.999.900,00 (100%) dan realisasi kinerja 4 jenis.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 4 jenis dan dengan anggaran sebesar Rp. 14.508.625,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 14.508.625,00 (100%) dan realisasi kinerja 4 jenis.
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 102.419.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 69.337.950,00 (67,70%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.

d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah

pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dengan target kinerja sebesar 2 Jenis dan anggaran sebesar Rp. 327.764.000,00. Realisasi kinerja sebesar 2 Jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp. 280.059.200,00 (85,45%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 38.000.000,00 (95%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 10 jenis dan anggaran sebesar Rp. 287.764.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 242.059.200,00 (84,12%) dan realisasi kinerja 10 jenis.

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan dengan target kinerja sebesar 3 jenis dengan anggaran sebesar Rp. 511.986.736,00. Realisasi kinerja sebesar 3 jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp. 469.442.724,00 (91,69%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 1 jenis dan anggaran sebesar Rp2.250.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp 2.250.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 1 jenis.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 3 Jenis dan anggaran sebesar Rp. 205.133.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 163.611.354,00 (79,76%) dan realisasi kinerja 3 Jenis.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 26 Jenis dan anggaran sebesar Rp. 304.603.036,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 303.581.370,00. (99,66%) dan realisasi kinerja 26 Jenis.

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dengan target kinerja sebesar 2 Jenis dengan anggaran sebesar Rp. 2.351.702.980,00. Realisasi kinerja sebesar 2 Jenis dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.321.442.320,00 (98,71%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 10 unit dengan anggaran sebesar Rp. 793.117.632,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 769.304.448,00 (97%) dan realisasi kinerja 10 unit.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 13 Jenis dan anggaran sebesar Rp. 1.558.585.348,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.552.137.872,00 (99,59%) dan realisasi kinerja 13 Jenis.

Adapun terdapat Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain sebagai berikut:

- a) Masih ada beberapa Kegiatan beberapa kegiatan yang belum biasa dilaksanakan. Sehingga akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan.
- b) TAPERA belum dilaksanakan kegiatannya karena belum ada instruksi, sehingga akan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait instruksi mengenai TAPERA

II. Program Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan dengan anggaran sebesar Rp. 8.470.063.300,00 bertujuan untuk pencapaian hasil penelitian dan pengembangan. Indikator kinerja Program adalah persentase hasil Kelitbangan yang diimplementasikan sebesar 75 persen. Realisasi capaian kinerja sebesar 100 persen dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 7.852.478.373,00 (92,71%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penelitian dan Pengembangan, sebagai berikut:

a) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk persentase pencapaian hasil penelitian dan pengembangan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan target kinerja 14 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 8.076.457.300. Realisasi kinerja sebesar 14 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.471.920.463 (92,51). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 6.842.201.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 6.600.319.013,00 (96,46%) dan realisasi kinerja 2 dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan target jumlah Kajian/Penelitian, 1 dokumen, dan anggaran sebesar Rp. 266.959.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 264.960.650,00 (99,25%) dan realisasi kinerja 1 Dokumen.
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa dengan target kinerja Analisa Data Sensus sebesar 1 dokumen, dan anggaran sebesar Rp. 722.296.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 492.520.050,00 (68,19%) dan realisasi kinerja 1 dokumen.
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, dengan target Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 1 dokumen, *Innovation Government Awards* (IGA) 1 dokumen, IPKD 1 dokumen, penerbitan Buku Jurnal dan E-jurnal Bali Membangun Bali 3 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 135.088.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 100.880.100,00 (74,68%) dan realisasi kinerja IDSD

1 dokumen, IGA 1 dokumen, IPKD 1 dokumen, penerbitan Buku Jurnal dan E-jurnal Bali Membangun Bali 3 dokumen.

- 5) Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan, dengan target 4 dokumen dan anggaran sebesar Rp109.911.800,00, realisasi anggaran sebesar Rp13.240.650,00 (12,05%) dan realisasi kinerja 4 dokumen.

b) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk persentase Pencapaian Hasil Penelitian dan Pengembangan. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen Kajian/Penelitian dan anggaran sebesar Rp. 347.436.600,00. Realisasi kinerja sebesar 11 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp. 336.183.010,00 (96,76%). Sub kegiatan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, dengan target 5 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 35.981.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 33.338.200,00 (92,65%) dan realisasi kinerja 5 dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, dengan target 4 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 216.025.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 209.528.660,00 (96,99%) dan realisasi kinerja 4 dokumen.
- 3) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dengan target 1 laporan dengan anggaran sebesar Rp. 83.274.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 81.726.450,00 (98,14%) dan realisasi kinerja 1 laporan.
- 4) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Perhubungan dengan target 1 dokumen/laporan dan anggaran sebesar Rp. 12.155.800,00, realisasi anggaran Rp. 11.589.700,00 (95,34%) dan realisasi kinerja 1 dokumen/laporan

c) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk untuk persentase pencapaian hasil Penelitian dan Pengembangan. Indikator kinerja

kegiatan adalah fasilitas permohonan HKI dan anggaran sebesar Rp. 46.169.400,00. Realisasi kinerja sebesar 80 pemohon dan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.374.990,00 (96,11%).

Sub kegiatan dalam Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi :

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, dengan target 75 Pemohon dan anggaran sebesar Rp. 46.169.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 44.374.990,00 (96,11%) dan realisasi kinerja 80 pemohon

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali s/d Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN (BERDASARKAN PEMETAAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Target Kinerja Tahun 2021		Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2022	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra	Sisa Target Kinerja yang belum tertangan i	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja Tahun 2023	Kebutuhan Pendanaan Tahun 2023	Lokasi
		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						
		Program Kegiatan Sub Kegiatan							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan OPD provinsi bali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	17,402,431,380	Dps
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	Jumlah dok perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	17 dok	17 dok	51 dok	17dok	17 dok	125,831,300.00	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	12 dok	12 dok	36 dok	12 dok	12 dok	65,192,900	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi Badan Riset dan Inovasi daerah Provinsi Bali yang tersusun tepat waktu	5 dok	5 dok	15 dok	5 dok	5 dok	60,638,400	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan yang diselesaikan	Jumlah dokumen Realisasi Administrasi Keuangan yang diselesaikan	643 dok, 4 lap	629 dok, 5 lap	1900 dok, 15 lap	628 dokum, 6 lap	629 dok, 5 lap	11,595,896,824	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	42 dok	28 dok	84 dok	14 dok	28 dok	11,562,362,474	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen SPJ yang Di Verifikasi	600 dok	600 dok	600 dok	600 dok	600 dok	15,573,850	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		jumlah laporan akuntansi keuangan	4 lap	5 lap	15 lap	6 lap	5 lap	10,628,400	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	1 dok	1 dok	3 dok	1 dok	1 dok	7,332,100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum yang dilaksanakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	63 jenis, 100 %	63 jenis, 100%	70 jenis, 100%	70 jenis, 100%	63 jenis, 100%	690,572,900	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik penerangan/ bangunan kantor	12 jenis	10 jenis	36 Jenis	14 Jenis	10 jenis	22,524,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	33 jenis	28 jenis	99 Jenis	38 Jenis	28 jenis	54,752,900	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah pengisian tabung gas lpg	10 jenis	9 jenis	30 Jenis	11 Jenis	9 jenis	157,500,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	4 jenis	12 jenis	12 Jenis	-	12 jenis	25,180,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	4 jenis	4 jenis	9 Jenis	1 jenis	4 jenis	15,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	100%	100%	100%	100%	100%	415,616,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	11 jenis	7 Jenis	39 Jenis	21Jenis	8 Jenis	952,920,000	
Pengadaan Mebel		Jumlah jenis pengadaan mebel	1 jenis	-	3 Jenis	2 Jenis	1 Jenis	233,800,000	

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	10 jenis	7 jenis	18 Jenis	1 Jenis	7 jenis	719,120,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang disediakan	jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	30 jenis	38 Jenis	90 Jenis	22 Jenis	38 Jenis	553,496,036	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jenis materai dan benda pos lainnya yang disediakan	1 jenis	1 Jenis	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	3,480,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	3 Jenis	9 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	226,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	26 jenis	34 jenis	78 Jenis	18 Jenis	34 jenis	324,016,036	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	10 unit, 13 jenis	10 Unit, 13 jenis	30 Unit, 36 Jenis	10 Unit, 10 Jenis	10 Unit, 13 jenis	3,483,714,320	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	30 Unit	10 unit	10 Unit	837,240,835	

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	13 jenis	13 jenis	36 Jenis	10 jenis	13 jenis	2,646,473,485	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Penelitian dan Pengembangan Kelitbangan yang dicapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	14,470,934,620	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian dan Pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	14 dok	14 dok	21 dok, 100%	100%	7 dok, 100%	9,750,000,000	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kelompok Ahli Pembangunan. Jumlah laporan FGD terkait kajian kebijakan pemerintah	2 dok	5 dok	3 dok, 100%	100%	5 dok	7,500,000,000	

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat		Jumlah kajian/penelitian	1 dok	-	3 dok, 100%	2 dok, 100%	1 dok, 100%	3000,000,	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa		Analisa data sensus	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	850,000,000	
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Innovative Government Awards (IGA), IPKD, Penerbitan Buku dan E-Jurnal Bali Membangun Bali	6 dok	5 dok	9 dok	0	5 dok	650,000,000	
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan		Dokumen evaluasi	4 dok	3 dok	6 dok, 100%	100%	3 dok	450,000,000	

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembnagunan	Jumlah dokumen kajian/ penelitian	11 do	8 dok	45 dok	26 dok	16 dok	2,400,000,000	
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Hasil Kajian/ Penelitian Bidang ekonomi dan Pelaksanaan Seminar	5 dok	5 dok	15 dok	5 dok	5 dok	450,000,000	
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara		Jumlah Dokumen Kajian BUMD	4 dok	-	12 dok	8 dok	-		
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		Jumlah Kajian hasil koordinasi	1 dok	-	3 dok	2 dok	1 dok	325,000,000	
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Kajian/ Penelitian Bidang Perkebunan dan Pangan.	1 dok	2 dok	9 dok	6 dok	2 dok	350,000,000	
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		Jumlah Kajian/ Penelitian Pekerjaan Umum	-	-	3 dok	3 dok	-		
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		Jumlah dokumen kajian koperasi, usaha kecil dan menengah	-	-	2 dok	2 dok	1 dok	250,000,000	
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral		Jumlah Kajian/ Penelitian Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	-	1 dok	3 dok	2 dok	1 dok	325,000,000	

Penelitian dan pengembangan bidang Lingkungan Hidup		Jumlah kajian/penelitian Lingkungan Hidup					1 dok	700,000,000	
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kajian/ penelitian		-	6 dok	6 dok	2 dok	925,000,000	
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Jumlah Kajian/ Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan . Pelaksanaan FGD Bidang Pariwisata. Persentase kajian/ penelitian bidang sosial dan kependudukan yang direkomendasikan	-	-	3 dok	3 dok	1 dok	350,000,000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan					1 dok	225,000,000	
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Jumlah Kajian/ Penelitian Bidang Kesehatan . Pelaksanaan	-	-	3 dok	3 dok	1 dok	350,000,000	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan	Fasilitasi Permohonan HKI, Inventarisasi data permohonan HKI di 9 Kab/ Kota	75 KI (100%)	75 KI (100%)	75 KI (100%)	75 KI (100%)	75 KI (100%)	1,395,934,620	

Uji Coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi		Jumlah Dokumen Pelaksanaan IPTEKS	-	1 dok,	3 dok	2 doK	1 dok,	327,632,480	
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil - hasil kelitbanagn		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Hasil Kelitbangan	-	2 kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	2 kegiatan	360,302,140	
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang difasilitasi	75 KI	75 KI	75KI	75 KI	75 KI	458,000,000	
Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali						1 dok	250,000,000	
TOTAL PAGU INDIKATIF 2023								31,873,366,000.00	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2019 Nomor 7), Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Perangkat Daerah yang baru terbentuk tahun 2020. Seperti diketahui, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mengampu misi nomor 22, yakni mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali memiliki tugas melaksanakan Riset dan Inovasi, serta pengelolaan kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya pembangunan Provinsi, tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Krama Bali secara *sakala* dan *niskala* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga diharapkan capaian dari masing-masing kegiatan nantinya dapat memberikan kontribusi penting atas target yang telah ditetapkan, sesuai RPJMD 2018-2023

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi IKU maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada target capaian dokumen Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

RJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 disusun dengan mempertimbangkan kondisi Provinsi Bali dalam keadaan normal. Namun dengan terjadinya Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga saat ini yang berdampak pada lesunya perekonomian Bali, dibutuhkan perubahan target capaian ekonomi makro. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi Provinsi Bali yang

masih dalam proses pemulihan setelah mengalami kontraksi akibat dampak Pandemi COVID-19.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi tidak terlepas oleh permasalahan yang dihadapi sehingga akan menimbulkan dampak terhadap pencapaian program kegiatan. Dalam penyelenggaraan tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali pada Tahun 2021 melaksanakan 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan, namun demikian, adanya pandemic COVID-19 yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah menuntut adanya refocusing dan realokasi anggaran perangkat daerah dalam upaya penanganan pandemi tersebut. Rasionalisasi Anggaran BRIDA tahun 2021 mencapai Rp. 4.939.745.616,00, sehingga terjadi perubahan belanja dalam RKPD – Perubahan Tahun 2021 menjadi Rp. 21.220.759.855,00

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan upaya untuk dapat tetap mencapai target/optimalisasi target telah dilaksanakan:

- 1) melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan rutin/operasional yang tidak *urgent*;
- 2) berkoordinasi dengan perguruan tinggi terkait kajian-kajian yang dapat difasilitasi sesuai tema riset yang telah diagendakan;
- 3) melanjutkan kegiatan yang telah berkontrak dan berjalan pada T.A 2022

Upaya – upaya tersebut dilakukan agar Pencapaian Kinerja Pelayanan yang telah ditetapkan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tetap dapat tercapai secara maksimal.

Tabel 2.3

Kinerja Pelayanan Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah sampai Tahun 2021

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
ASPEK PELAYANAN UMUM									
4	Penelitian dan Pengembangan								
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
	Penerapan SIDA:		-	-	-	-	-	-	-
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persentase (%)	13,6 6/44	13,6 6/44	13,6 6/44	13,6 6/44	16,6 6/36	13,6 6/44	18,18 6/33
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persentase (%)	66,6% 6/9	66,6% 6/8	66,6% 6/8	66,6% 6/8	77,8% 7/9	66,6% 6/8	77,8% 7/9

Tujuan strategis yang hendak dicapai adalah terwujudnya hasil riset dan inovasi yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan sasaran IKU tahun 2021 yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatnya Hasil Riset Yang Dimanfaatkan Dalam Perumusan Kebijakan;
2. Meningkatnya Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Tabel 2.4
Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Target Kinerja	Capaian 2021	% Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya Hasil Riset Yang Dimanfaatkan Dalam Perumusan Kebijakan;	100 %	100%	100%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	100% (75 KI)	80 KI	105%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

A. Hambatan atau Kendala Utama

Keberadaan Perangkat Daerah Badan Riset Dan Inovasi Daerah merupakan jawaban atas beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap belum efektif, efisien, tepat sasaran, dan belum memberikan manfaat yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. Oleh karena itu, Perangkat Daerah ini diharapkan menjadi sumber rekomendasi dan evaluasi kebijakan yang telah ada, atau menjadi rujukan munculnya kebijakan baru, baik itu yang melalui kajian ataupun penelitian dan dapat langsung diimplementasikan. Dengan adanya Perangkat Daerah ini, juga sangat diharapkan munculnya inovasi-inovasi baru dan dikelola kekayaan Intelektualnya sehingga akan mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Bali dan kesejahteraan Masyarakat Bali

Pembangunan di Provinsi Bali memerlukan dukungan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK agar dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian menghadapi persaingan global. Meski demikian, tidak berarti IPTEK dan inovasi hanya diorientasikan semata pada pembangunan industri, tetap juga harus memberi prioritas kepada penelitian sosial kemanusiaan. Untuk itu, terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah Provinsi Bali berbasis riset dan inovasi, sehingga masyarakat Bali akan semakin mandiri dan sejahtera. Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam kelitbangan dan inovasi adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil-hasil riset sebagian besar belum terimplikasikan di dunia usaha industri dan masyarakat sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Tema Riset yang dilaksanakan oleh Lembaga Riset belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah
- 3) Belum terbangunnya kolaborasi dan integrasi antara lembaga riset dengan pengguna pemerintah, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan akses pendanaan riset dan berbagai sumber: APBN, APBD, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya.
- 5) Belum terbangunnya pangkalan data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi.
- 6) Banyak kekayaan intelektual komunal dan personel yang belum terlindungi

B. Tindak Lanjut

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut agar tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dengan seluruh *stakeholders* dalam dalam penetapan kegiatan berdasarkan kajian/penelitian mendapatkan data hasil penelitian untuk pengembangan inovasi daerah
- 2) Melakukan pendataan produk inovasi serta berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dilakukan identifikasi dan inventarisasi produk unggulan untuk komersialisasi

- 3) Melakukan pengelolaan pegawai dan penempatan pegawai yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan melalui diklat/kursus yang dilakukan oleh badan diklat agar dapat mendukung tugas riset dan inovasi.
- 4) Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan produk unggulan daerah menjadi produk industri unggulan serta proses intermediasi dan difusi teknologi untuk membangun suatu proses pemanfaatan hasil-hasil riset agar dapat dinikmati oleh masyarakat.
- 5) Mengembangkan sistem inovasi dengan mendorong faktor-faktor kunci keberhasilan diantaranya keterkaitan (*linkages*), kemitraan (*partnership*), jaringan (*netwoking*), interaksi serta sinergi positif disertai Mengembangkan klaster inovasi yang merupakan jembatan yang dapat memfasilitasi komunikasi yang intensif dan kerjasama antara lembaga penelitian dan industri yang ada di Bali.

2.4 Kebijakan Renja 2023

Bahwa kebijakan dalam penyusunan Rancangan Renja BRIDA T.A 2023 adalah untuk memperkuat dari implementasi RKPD 2023, yakni: “*Penyeimbangan Struktur Dan Fundamental Perekonomian Bali Melalui Ekonomi Kerthi Bali*”. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan konsep Transformasi Ekonomi Kerthi Bali guna menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali guna terwujudnya Bali Berdikari dalam Bidang Ekonomi. Perekonomian Bali saat ini didominasi oleh Sektor Pariwisata (56,78%), Sektor Pertanian (9,24%), Sektor Kelautan/Perikanan(4,21%), Sektor Industri(14.63%), dan Sektor lain (15,14%). Kontribusi sektor di luar pariwisata relatif kecil, bahkan berpotensi terus mengalami penurunan. Perekonomian Bali sangat tergantung dan sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal.

Lebih lanjut, secara eksternal, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi digital sudah sangat dinamis, masif, dan mengglobal merasuk dalam keseluruhan tatanan kehidupan masyarakat dunia. Untuk itu perlu diakomodasi dan diterapkan dalam memperkuat struktur dan fundamental perekonomian Bali. Oleh karenanya, guna memperkuat struktur dan fundamental perekonomian Bali diperlukan suatu konsep ekonomi yang komprehensif, yaitu Ekonomi Kerthi Bali,

Ekonomi Kerthi Bali bertujuan membangun perekonomian Bali yang harmonis terhadap alam beserta isinya serta memberikan manfaat dan nilai tambah berganda secara langsung dan tidak langsung, baik nilai tambah ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, maupun tatanan kehidupan. Ekonomi Kerthi Bali akan menjadi acuan/pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan perekonomian Bali. Serta dapat di adopsi untuk pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional dan internasional. Ekonomi Kerthi Bali akan menjadi arus utama (*mainstream*) baru pembangunan perekonomian, sebagai paradigma baru pembangunan perekonomian yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat. Konsep transformasi Ekonomi Kerthi Bali ini telah dijadikan model transformasi ekonomi berupa Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan oleh

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, dan telah berkenan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 3 Desember 2021. Dalam sambutan peluncuran, Presiden RI Joko Widodo menyebutkan tiga hal yang menjadi catatan dalam pembangunan Bali. Pertama, diversifikasi ekonomi, meliputi pariwisata hingga pertanian. Kedua, paradigma dan tata kelola pariwisata harus memprioritaskan kesehatan dan keamanan. Ketiga, pariwisata Bali bertransformasi dari *mass tourism* menjadi *green tourism* serta *quality tourism*, mengusung pariwisata berbasis sosial, budaya, dan lingkungan, mewujudkan harmoni dan memuliakan alam.

Berkaitan dengan hal tersebut, arah kebijakan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) BRIDA Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada penguatan implementasi Tema RKPD Tahun 2023 yakni penyeimbangan struktur dan fundamental Perekonomian Bali pada 6 (enam) sektor utama Ekonomi Kerthi Bali, meliputi penguatan pada sektor pertanian, kelautan/perikanan, industri, IKM dan UKM serta Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata melalui Program Urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yakni fasilitasi kajian/penelitian bidang prioritas dan penunjang pembangunan Bali yang akan mendukung peta jalan ekonomi Kerthi Bali; peningkatan kerjasama kelitbangan dengan PT dalam mendukung ekonomi Kerthi Bali; Fasilitasi KI karma Bali; serta Pengembangan TIK dalam mendukung data/informasi pelayanan Kelitbangan

Rancangan Renja Tahun 2023 khususnya untuk urusan penelitian dan pengembangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dimana terdiri atas 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan, yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan total 6 (enam) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp17.402.431.380, atau 54,60% dari keseluruhan anggaran yang diusulkan serta untuk Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Program Prioritas terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 14.470.9324.620,- atau sebesar 45,40% dari keseluruhan anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 31.873.366.000,-

Hasil Analisis Kebutuhan terkait dengan Program/Kegiatan Tahun 2023 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merujuk pada Tabel 7.2 B RPJMD-P Semesta Berencana 2018-2023 serta Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah 2018-2023.



Gambar 2.2
Rancangan Struktur Program Anggaran BRIDA Tahun 2023

Tabel 2.5
Identasi Kebutuhan Rancangan Rencana Kerja (Renja)
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	I. FIXED COST			II. Belanja Penunjang	III. Belanja Prioritas	
		Gaji dan Tunjangan ASN (Rp)	Gaji dan THR Tenaga Kontrak Serta (Rp)	Operasional Rutin (Rp)	(Kesekretariatan) (Rp)	(Prioritas Urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah)	
1	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali (BRIDA)	11,562,362,474	Tenaga Administrasi : Rp. 899.434.752	Belanja Listrik, Air, Telpon Rp 226.000.000	Administrasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja: Rp 125.831.300	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi pelaksanaan Riset/ Kajian dalam upaya mendukung implementasi pelaksanaan program Ekonomi Kerthi Bali dan Fasilitasi KI
			Tenaga Malam: Rp. 112.429.344	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Rp 466.952.803	Administrasi Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan: Rp 33.534.350	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
			Sopir/Pengemudi: Rp.370.288.032		Sarana dan Prasarana Penunjang, Logistik, Administrasi Pelayanan Umum Rp 3.343.263.289	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			Sopir/Pengemudi: Rp.370.288.032			Pengembangan dan Inovasi Teknologi	
			Cleaning Service: Rp. 149.905.792				
			Tukang Kebun: Rp.112.429.344				
			Honorarium POKLI Pembangunan Rp. 7.404.000.000				
			TOTAL	11,562,362,474	8.508.487.264	692.952.803	
TOTAL KEBUTUHAN RANCANGAN AWAL RENJA						25.430.419.849	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan Riset dan Inovasi, serta pengelolaan kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya pembangunan Provinsi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Krama Bali secara sakala dan niskala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pada Forum Perangkat Daerah Tahun 2022 dimana ada beberapa Usulan Masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat diuraikan dapat diuraikan sebagai berikut : hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis di masukan dalam daftar panjang; Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang pada nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek

Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah **tidak ada usulan Sub Kegiatan baru**, hal ini karena Program/Kegiatan yang telah dirancang sudah bisa menjawab permasalahan yang terjadi, namun pada adanya usulan terkait penyesuain topik riset yang perlu diprioritaskan, antara lain:

No	Nama Usulan Kajian/ Penelitian	Luaran
1	Kajian Carrying Capacity Kepariwisata Bali	Rekomendasi Kajian untuk melaksanakan Mondatorium pengembangan akomodasi (hotel) di Kaasan Bali Selatan khususnya
2	Kajian <i>Digital Nomade Tourism</i>	Meningkatnya potensi pengembangan Pariwisata berbasis digital bagi professional/excpert tourism untuk bekerja dari Bali sehingga dapat meningkatkan PAD,
3	Kajian Efektivitas Pelakssanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Mengetahui Dampak Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah
4	Kajian Literasi Berbasis Kearifan Lokal	Mengetahui potensi kearifan lokal (seperti wayang, dll) sebagai sarana pengembangan Pendidikan bagi generasi muda/millennial

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Rencana Kerja Pemerintah T.A 2023

Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 akan mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. “Tema dari RKP 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terdapat tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2023, yakni:

1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Hal ini dilakukan dengan memperkuat Sistem Jaminan Sosial, Modernisasi Pertanian serta Pemerataan Pembangunan, dengan indikator yang ingin dicapai :

- a) Diharapkan pada tahun 2024 (kemiskinan ekstrem) bisa mencapai 0-1 persen, artinya tahun 2023 harus mampu menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5-3 juta penduduk.
- b) Dalam proses penghapusan kemiskinan ini diharapkan proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 91%.
- c) Selain itu, diharapkan pula adanya peningkatan Nilai Tukar Petani/Nelayan 103-105/105-107.

2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.

Hal ini dilaksanakan melalui upaya penguatan sistem Kesehatan dan Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter), dengan indikator yang ingin dicapai:

- a) Prevalensi **stunting** (pendek dan sangat pendek) pada balita **17,5% menjadi menurun 14% di Tahun 2024.**
- b) Insidensi TB **211** per 100.000 penduduk
- c) Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar **71%**
- d) Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi **43 %**
- e) Persentase Sumber Daya Manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 **17,48%**

f) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas **9,24 tahun**.

g) Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT) **31,89 Persen**

3) Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan pekerja produktif (*decent job*).

Hal ini dilakukan melalui penyediaan lapangan usaha, dengan indikator yang ingin dicapai adalah:

a) Peningkatan proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi.

b) Peningkatan persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas.

c) Meningkatnya jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sampai 50.000 orang.

d) Meningkatnya persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan

4) Mendorong pemulihan dunia usaha.

Hal ini dilakukan melalui Revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, dengan target pencapaian indikator:

a) Pertumbuhan Wirausaha 3,50%

b) Pertumbuhan PDB Pertanian 3,9-4,2 %

c) Nilai Devisa Pariwisata US\$ 1,76-6,08 Miliar

d) Kontribusi PDB Pariwisata 4,3%

e) Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp.1.279 triliun

5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.

Hal ini dilakukan melalui Industrialisasi serta pelaksanaan Riset dan Inovasi, dengan target indikator pencapaian, yakni:

a) Pertumbuhan Industri Pengolahan sebesar **5,4-5,9 %**

b) Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Pengolahan sampai dengan **20,6 %**

c) Meningkatnya Produk Inovasi dan Produk Prioritas Nasional yang mampu dihasilkan

d) Meningkatnya Peringkat Global Innovation Index **75-80**

- e) Meningkatnya Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas sebesar **5,55-6,08%**
- f) Meningkatnya Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas menjadi sebesar 18,80%

6) Ekonomi hijau.

Mengingat Indonesia akan mencapai *net-zero emission* pada tahun 2060, jadi pembangunan rendah karbon dan dalam hal ini transisi energi menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim. Upaya mewujudkan Ekonomi rendah karbon dan melakukan Transisi energi wajib dilaksanakan, sehingga kondisi yang diinginkan di Tahun 2023 adalah:

- a) Adanya Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sampai dengan **27,02 %**
- b) Peningkatan Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT-kumulatif sebesar **1.778,2 GW**
- c) Meningkatnya Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan
- d) Meningkatnya Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau

7) Terakhir, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Hal ini dilakukan dengan penyediaan air bersih dan sanitasi, Infrastruktur Digital serta Infrastruktur Konektivitas, dengan indikator target pencapaian:

- a) Peningkatan volume tampungan air per kapita **54,50m³/det.**
- b) Meningkatnya persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman.
- c) Peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak
- d) Terjangkaunya Masyarakat menggunakan Internet. Dimana diharapkan Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik-kumulatif mencapai **50%**

3.2 Telahaan Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah T.A 2023

Visi yang telah ditetapkan Oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, yaitu : **NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA MENUJU BALI ERA BARU** Yang mengandung makna “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama dan Gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi **Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.**” Menuju Bali Era Baru.

Sedangkan, dari 22 misi yang ada, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, maka yang menjadi dasar daripada tujuan yang ingin diwujudkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah Misi yang ke 22, yaitu: **Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, terbuka dan transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.** Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan.

Dalam Rancangan Awal RKPD 2023 (Bappeda Prov Bali, 2022) dijelaskan bahwa dalam upaya mencapai tujuan, dan sasaran pembangunan, selain memperhatikan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, juga sangat dibutuhkan landasan perencanaan yang *SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Timely)* yang ditempuh melalui pendekatan secara Tematik sesuai agenda pembangunan, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* (lintas sektor), dan *Spatial* (titik koordinat) lokasi kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian program pembangunan yang dirancang harus memperhatikan :

1. Keterkaitan antara penganggaran dan sasaran yang dituju;
2. Memperhatikan kemanfaatan kegiatan, efektifitas dan efisiensi dalam anggaran; dan
3. Meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan anggaran yang tertib.

Bidang Pangan, Sandang dan Papan sebagai prioritas 1 daerah Provinsi Bali. Untuk mewujudkan prioritas tersebut maka arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada pelaksanaan program prioritas, yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) mengatasi kerentanan pangan, (2) identifikasi dan pemanfaatan potensi sumber daya pangan, (3) peningkatan ketersediaan pangan.
2. Peningkatan produksi sandang lokal Bali melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) pendampingan industri tenun (2) monitoring dan evaluasi industri tenun.
3. Peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat miskin sangat penting dilakukan mengingat perumahan merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia. Program prioritas ini akan dilaksanakan dalam upaya, (1) penyediaan bantuan rumah layak huni, (2) pembuatan sumur bor untuk wilayah yang belum mendapat pelayanan PDAM, (3) pembangunan instalasi pengolahan sampah, (4) pembangunan dan normalisasi sanitasi permukiman.
4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) pengembangan pangan pokok lokal non beras, (2) pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong, (3) promosi penganekaragaman pangan.
5. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) mengolah hasil pertanian pasca panen, (2) memastikan nilai jual harga hasil pertanian menguntungkan bagi petani.
6. Pengembangan koperasi pengerajin tenun merupakan industri kerajinan rakyat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat desa, tradisi menenun masih ada dan terus dikembangkan dalam menjaga tradisi leluhur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pendampingan industri tenun, (2) mendorong pemberdayaan koperasi tenun, (3) fasilitasi pemasaran, promosi dan optimalisasi penyerapan produk kerajinan tenun, (4) pemberian bantuan kredit dengan bunga ringan.
7. Penguatan distribusi produk lokal melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) peningkatan pemasaran produk lokal, (2) pelaksanaan pasar murah melalui operasi pasar.



Gambar 3.1
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1
Sumber : Rancangan Awal RKPD 2023, Bappeda Prov. Bali

Bidang prioritas 2 (dua) menggambarkan prioritas pendidikan dan kesehatan dengan menggunakan pendekatan secara *Tematik*, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* dan *Spasial* ditentukan 4 (empat) Program Prioritas yaitu:

1. Penguatan fasilitas pelayanan dasar, melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTP, (2) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTL, (3) penanggulangan bencana kluster kesehatan, (4) peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, (5) peningkatan obsteri neonatal *emergency* komprehensif/Ponek.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan prioritas dalam upaya, (1) peningkatan kesehatan gizi masyarakat, (2) peningkatan kesehatan keluarga, (3) pengembangan promosi kesehatan dan penggerakan masyarakat hidup sehat, (4) upaya kesehatan kerja, (5) upaya kesehatan olah raga, (6) peningkatan kesehatan masyarakat melalui dana BOK, (7) penanganan stunting.
3. Jaminan kesehatan karma Bali sejahtera, dilakukan melalui kegiatan (1) penguatan jaminan kesehatan karma Bali.

4. Peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMK, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/Kota, membangun atau mengembangkan laboratorium sarana dan prasarana ekstrakurikuler sekolah pendidikan menengah terpadu berdasarkan SPM, (2) menetapkan regulasi tentang SPM pendidikan menengah, (3) penetapan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan SPM.



Gambar 3.2
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2
Sumber : Rancangan Awal RKPD 2023, Bappeda Prov. Bali

Bidang prioritas 3 yaitu Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan ditentukan oleh 5 (lima) dimensi/Program Prioritas yaitu:

1. Program revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). Revitalisasi atau pemberdayaan dilakukan sesuai dengan potensi kearifan lokal masyarakat. Pelatihan pariwisata, pertukangan, perbengkelan, industri kerajinan dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata.
2. Peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat miskin merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah. Program prioritas ini akan dilaksanakan dalam bentuk bedah rumah bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah layak huni serta akses lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin.
3. Program pelayanan sosial, merupakan kegiatan prioritas, melalui (1) pelayanan lanjut usia di PSTW Jaramara Pati Singaraja, (2) pelayanan

lanjut usia di PSTW Wana Sraya Denpasar, (3) pelayanan lanjut usia di PSAA Udayana Wiguna Singaraja.

4. Program peningkatan rehabilitasi sosial, merupakan kegiatan prioritas dilaksanakan melalui, (1) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, (2) pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia.
5. Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja, merupakan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui, (1) pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair), (2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) bagi calon TKI ke luar negeri, (3) penyebaran informasi lapangan pekerjaan dan penyediaan tenaga kerja melalui bursa kerja online (BKOL), (4) pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan tenaga kerja penyebaran informasi lapangan pekerjaan dan penyediaan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS), (5) penyuluhan mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri bagi masyarakat/calon TKI, (6) pembinaan penggunaan tenaga kerja asing, (7) pengelolaan informasi pasar kerja, (8) penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja atau siswa, (9) perluasan kerja sistem padat karya (PKSPK), (10) penerapan dan pembekalan teknologi padat karya (TPK) sistem kelompok, (11) pembinaan tenaga kerja mandiri.



Gambar 3.3
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3
Sumber : Rancangan Awal RKPD 2023, Bappeda Prov. Bali

Bidang prioritas 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya dalam rangka pengembangan pembinaan dalam rangka mengembangkan tata kehidupan karma Bali ditentukan oleh 6 (enam) dimensi yaitu :

1. Penguatan desa adat, merupakan kegiatan prioritas yang dilaksanakan melalui, (1) pembinaan desa adat, (2) pendidikan dan pelatihan desa adat.
2. Penguatan subak, dilakukan melalui kegiatan (1) pembinaan subak dan subak abian, (2) pembinaan penyusunan awig-awig/perarem subak dan subak abian.
3. Pemajuan bahasa, aksara dan sastra, melalui kegiatan (1) alih aksara dan alih bahasa naskah kuno atau lontar, (2) perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra.
4. Pemajuan cagar budaya dan permuseuman, melalui kegiatan (1) penyusunan purana pura, (2) pembinaan permuseuman.
5. Pemajuan seni dan tenaga kebudayaan, dilaksanakan melalui kegiatan (1) Pesta Kesenian Bali/PKB, (2) peragaan dan pementasan seni budaya, (3) diplomasi kebudayaan, (4) pembinaan SDM tenaga kebudayaan, (5) festival seni masa kini, (6) penghargaan seni, (7) pameran seni rupa, (8) standarisasi dan sertifikasi lembaga seni (sanggar, yayasan dan sekaa).
6. Pemajuan nilai sejarah dan tradisi, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) penyusunan peristiwa sejarah, (2) pencatatan dan pengusulan warisan budaya tak benda, (3) Utsawa Dharma Gita.



Gambar 3.4
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4
Sumber : Rancangan Awal RKPD 2023, Bappeda Prov. Bali

Pada Bidang prioritas 5 (lima), diarahkan Pariwisata dalam rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berlandaskan filosofi *Tri Hita Karana* dalam menjaga keharmonisan alam semesta, manusia dan kebudayaan sebagai *genuine* Bali. Pada program prioritas pariwisata terdapat 5 (lima) dimensi yaitu :

1. Pengembangan kawasan wisata berbasis alam, dilaksanakan melalui kegiatan yaitu (1) Pengembangan kawasan wisata berbasis budaya, (2) Pengembangan kawasan wisata berbasis alam, dan (3) Pengembangan kawasan wisata berbasis buatan.
2. Peningkatan pemasaran pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan (1) analisa pasar dan indeks kepuasan masyarakat, (2) penyusunan data (MICT) dan statistik kepariwisataan.
3. Pengembangan standar industri pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan (1) pengawasan usaha jasa pariwisata, (2) pengawasan usaha sarana pariwisata, (3) penyusunan perda tentang kontribusi pariwisata (*passanger fee*).

4. Pengembangan SDM pariwisata dilaksanakan melalui kegiatan (1) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan, (2) peningkatan peran serta kelembagaan kepariwisataan.
5. Pengembangan produk pariwisata. Kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW buatan, (2) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW alam, (3) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW budaya.



Gambar 3.5

Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5

Sumber : Rancangan Awal RKPD 2023, Bappeda Prov. Bali

Sedangkan berdasarkan Bidang Prioritas Penguatan Infrastruktur (darat, laut dan udara) untuk mendukung semua program prioritas. Kebutuhan akan sarana dan prasarana untuk pembangunan jalan, jembatan, waduk, pabrik, pasar, sentra industri yang akan mendukung konektivitas antar daerah. Terdapat 5 (lima) Program Prioritas yaitu :

1. Peningkatan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi, melalui kegiatan (1) peningkatan kinerja/tingkat pelayanan ruas jalan dan pesimpangan jalan, (2) peningkatan layanan angkutan, (3) pengembangan aksesibilitas pelayanan, (4) peningkatan keterpaduan moda, (5) peningkatan kualitas jalan dan jembatan.

2. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) peningkatan penyebarluasan informasi, (2) pengembangan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, (3) pengembangan data/informasi/statistic daerah, (4) pemantapan hubungan jaringan sandi dan telekomunikasi.
3. Fasilitasi kesesuaian ruangan dan bangunan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan (1) validasi kebijakan perencanaan penataan ruang, (2) peningkatan kesesuaian pembangunan dengan perencanaan penataan ruang, (3) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
4. Peningkatan kapasitas pelayanan dasar, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) penanganan kawasan permukiman kumuh, (2) peningkatan layanan air minum, (3) peningkatan layanan air limbah.
5. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, (2) pengendalian atau pengamanan pantai.



Gambar 3.6
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Bidang Prioritas
Pembangunan Infrastruktur
Sumber : Rancangan Awal RKPD 2023, Bappeda Prov. Bali

Prioritas 7 (tujuh) adalah tentang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang tidak bisa dipisahkan dari Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), ditentukan oleh 6 (enam) dimensi/Program Prioritas yaitu :

1. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) penerapan atau implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, (2) penyusunan rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah/KDH tentang penjabaran APBD.
2. Peningkatan profesionalisme aparat pemerintah, program prioritas ini dilaksanakan melalui, pelatihan, pendidikan dan melalui pemberian bantuan pendidikan.
3. Efektifitas, efisiensi dan transparansi, kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pengawasan program prioritas, (2) pengembangan potensi pembiayaan daerah, (3) perumusan kebijakan daerah.

4. Peningkatan kapasitas pendapatan daerah, dilakukan melalui kegiatan, (1) penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah, (2) penyusunan peraturan dokumen (NJKB).
5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, kegiatan ini dilaksanakan melalui peningkatan pengembangan pemerintahan.
6. Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik, program ini dilaksanakan dalam upaya, (1) untuk mengetahui tingkat indek kepuasan masyarakat/IKM, (2) meningkatkan pelayanan publik, dan (3) peningkatan pelaksanaan kerjasama dalam mendorong bertumbuhnya investasi dan pergerakan ekonomi daerah.



Gambar 3.7
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Bidang Prioritas Tata
Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Sumber : Rancangan Awal RKPD 2023, Bappeda Prov. Bali

3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Memperhatikan perubahan paradigma dan peranan penelitian dan pengembangan sebagai fasilitator, mediator, dan inovator dalam pelaksanaan pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dituntut

terdepan untuk lebih mampu mengantisipasi perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Oleh karenanya, guna mendukung tercapainya pembangunan Provinsi Bali yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali 2018 sangat memerlukan dukungan riset yang inovatif dan kreatif serta terintegrasi berbasis ilmu pengetahuan dan Teknologi, untuk dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah, di tingkat Nasional maupun Internasional.

Riset dan inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan arah Pembangunan Daerah serta hasil-hasil riset dapat diterapkan oleh masyarakat dan industri. Riset yang terintegrasi perlu didukung dengan kemampuan dan kapasitas riset yang kuat dan terarah dengan melakukan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset yang ada dan selaras dengan perencanaan pembangunan Provinsi Bali. Saat ini sebagai indikator produktivitas Riset di Indonesia lebih banyak diukur dari peningkatan jumlah publikasi ilmiah internasional bereputasi yang mencerminkan kemampuan menciptakan invensi berbasis Riset dan terkadang hasil riset yang telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah beriputasi belum meningkatkan jumlah inovasi yang digunakan oleh industri dan/atau masyarakat. Sehingga secara riil belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi dan sinergi antara kebutuhan riset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam agenda riset daerah.

Makna dari rencana Pembangunan Daerah yang berkualitas adalah rencana yang mampu mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Dari 22 misi yang ada, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, maka yang menjadi dasar daripada tujuan yang ingin diwujudkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah Misi yang ke-22, yaitu: **Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif,**

terbuka dan transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.



Gambar 3.8
Posisi Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Bali Dalam RPJMD
SB 2018-2023

Tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam misi Kepala Daerah. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta sasaran yang ingin dicapai, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan Perangkat Daerah disusun guna memperjelas penjabaran dari sasaran yang ingin diraih dari misi dimaksud.

Untuk mewujudkan misi dan sasaran pembangunan yang ingin diwujudkan Kepala Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merumuskan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali 2018-2023. sebagai terlihat dalam tabel Target Kinerja berikut.

Tabel 3.1 Target Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi	Meningkatnya hasil riset yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	-	-	39%	50%	100%	100%
		Meningkatnya pengelolaan inovasi dan Kekayaan Intelektual (KI) Daerah	Persentase kekayaan intelektual (KI) yang didaftarkan	-	-	100%	100%	100%	100%

Catatan: tahun 2021, angka realisasi

Pada sisi lainnya, Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi IKU maupun IKK pada akhir tahun perencanaan. Mengacu pada target capaian dokumen Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, IKK sesuai tabel berikut:

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

No	Kategori Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Indikator	Target Capaian Tahun 2023	Skor Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	Pembangunan dan Pengembangan	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	50%	100%
2		Persentase kekayaan intelektual (KI) yang didaftarkan	100%	100%
3	Pembangunan dan Pengembangan	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	50%	100%
4		Persentase kekayaan intelektual (KI) yang didaftarkan	100%	100%
5	Pembangunan dan Pengembangan	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	50%	100%
6		Persentase kekayaan intelektual (KI) yang didaftarkan	100%	100%

3.4 Program dan Kegiatan

Guna mendukung tercapainya pembangunan Provinsi Bali yang berbasis ilmu pengetahuan dan Teknologi, sangat memerlukan dukungan riset yang inovatif dan kreatif serta terintegrasi yang dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah. Riset dan inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan arah Pembangunan Daerah serta hasil-hasil riset dapat diterapkan oleh masyarakat dan industri. Riset yang terintegrasi perlu didukung dengan kemampuan dan kapasitas riset yang kuat dan terarah dengan melakukan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset yang ada dan selaras dengan perencanaan pembangunan Provinsi Bali, sehingga secara riil akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi dan sinergi antara kebutuhan riset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang melalui pelaksanaan riset dan inovasi daerah.



Gambar 3.9
Orientasi Pelaksanaan Kerisetan BRIDA Provinsi Bali
Sumber : Rancangan Akhir Perubahan Renstra BRIDA 2018-2023

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas urusan penelitian dan pengembangan yang telah tertuang dalam Dokumen RPJMD dan Renstra akan dicapai selama 5 tahun mendatang, menjadi tanggung jawab Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, sebagai instansi dengan tugas pokok dan fungsi ***penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi bali di bidang penelitian dan pengembangan,*** sebagai berikut :

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 2023		INDIKATOR			PAGU INPUT 2023 SIPD
	PROGRAM	OUTPUT	VOL.SATUAN	RINCIAN/SPEKIFIKASI	25,430,419,849	
		(Sesuai Kep Mendagri 050-5889 Tahun 2021)				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					14,502,772,549
1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					56,271,800
	1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	<i>Dok. Billateral Meeting, Rancangan Renja, Forum PD, Desk-Musrenbang, Renja, Renja-P, RKA,RKA-P, DPA, DPPA,PK, Dok. Reviu)</i>	45,259,700
	2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	<i>LKjIP,LKPJ,SPIP, SIDALEV, Laporan Evaluasi Kegiatan</i>	11,012,100
2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					10,641,005,185
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang/bulan	<i>Gaji dan Tunjangan ASN Golongan II s.d Gol IV beserta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)</i>	10,624,746,285
	2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dok	<i>Dokumen SPJ</i>	7,592,200

	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dok	<i>Dokumen LRA, LO, LPE, Laporan Neraca dan Calk,</i>	5,199,600
	4	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	<i>Lap UnAudited</i>	3,467,100
3		KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				512,465,400
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	<i>Komponen Alat-alat listrik, Lampu listrik, kabel listrik, dll (Kabel, Lampu, etc)</i>	21,959,400
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 Paket	<i>Komponen Alat-alat Tulis kantor (Kertas, Tinta, etc)</i>	54,750,000
	3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	<i>Sarana Piodalan, Penjor, Umbul - Umbul, etc</i>	157,500,000
	4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	<i>Foto copy, Buku Agenda, Buku Ekpedisi, etc</i>	20,424,000
	5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	<i>Surat Kabar Nasional dan Lokal</i>	15,000,000
	6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	<i>Laporan Penyelenggaraan Rapat, Laporan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah</i>	242,832,000

4		KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				552,180,000
	1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	<i>Mebel, Filling Kabinet, etc untuk menunjang pelayanan dan administrasi perkantoran</i>	15,000,000
	2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	<i>Komputer PC, Laptop, AC, Printer, etc</i>	537,180,000
5		KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				550,014,036
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	<i>Belanja Materai/Perangko 10000</i>	0
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	<i>Laporan Bulanan Pemakaian Listrik, Air dan Telpon</i>	226,000,000
	3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	<i>Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Yang Disediakan dan Pembayaran Tenaga Kontrak</i>	324,014,036
6		KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2,190,836,128

	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	<i>Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan 2</i>	837,232,032
	2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	<i>Pembayaran Tenaga Keamanan, Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin, etc</i>	1,353,604,096
	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				10,927,647,300
	1	KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PENGKAJIAN PERATURAN				9,127,647,900
	1	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	6 Laporan	- 4 Laporan Kajian/Laporan Pokli Pembangunan - 1 Laporan Rakor kelitbangan di Provinsi Bali - 1 Laporan Seminar Nasional tentang Jurnal	7,810,000,000
	2	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Dokumen	- Dokumen Kajian Mitigasi Bencana Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung.	0

3	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	2 Laporan	- 1 Laporan Kajian Potensi Ekonomi Desa Adat - 1 Laporan Pemutakhiran Sensus Desa Adat	850,000,000
4	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	7 Dokumen	- 1 Dokumen Big Data tentang Ekonomi Bali Kerthi - 1 Dokumen IPKD - 1 Dokumen IKKD - 3 Dokumen Jurnal Bali Membangun Bali - 1 Dokumen FGD IKKD, IPKD dan Jurnal	379,335,600
5	Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru Dan/Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	5 Rekomendasi	- 1 Rekomendasi RUU Provinsi Bali - 1 Rekomendasi Kajian/ Evaluasi Perda Provinsi Bali tentang Desa Adat - 1 Rekomendasi Kajian/ Evaluasi Pergub Bali tentang Energi Bali Bersih - 1 Rekomendasi Kajian/ Evaluasi Pergub Bali tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi/ Destilasi Khas Bali - 1 Rekomendasi Kajian/ Evaluasi Pergub Bali tentang Busana Adat Bali	88,312,300

2		KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN			950,000,000	
	1	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	6 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan Ekonomi Makro TW 4 Tahun 2021 2. Laporan Ekonomi Makro TW 1 Tahun 2022 3. Laporan Ekonomi Makro TW 2 Tahun 2022 4. Laporan Ekonomi Makro TW 3 Tahun 2022 5. Laporan Indek Daya Saing Daerah 6. Laporan Kajian Strategi Pengembangan Usaha Sandang sebagai Produk Unggulan Lokal dan Ekspor 	150,000,000
	2	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan Dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	<i>Kajian/ Penelitian tentang Distribusi dan pemanfaatan produk pertanian berbasis Teknologi 4.0</i>	500,000,000
	3	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	<i>Dokumen Kajian Pengembangan SPKLU Berbasis Energi Bersih untuk Mendukung Infrastruktur KBLBB di Provinsi Bali</i>	0

	4	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	<i>Dokumen Pemanfaatan Potensi Tenaga Air sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang Terintegrasi dengan Pembukaan Daerah Tujuan Wisata Baru di Waduk Sidan dan Waduk Tamblang Provinsi Bali</i>	300,000,000
	5	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	<i>Dokumen Kajian Kontribusi IKM, UKM terhadap PDRB</i>	0
	6	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	1 Dokumen	<i>Dokumen Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Bali</i>	0
3		KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI				849,999,400
	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	75 Laporan	<i>75 Laporan Fasilitasi Pendaftaran KI</i>	330,000,000
	2	Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	<i>- Laporan penghargaan dan pengembangan IPTEKS - Laporan Roadmap pelaksanaan SiDa</i>	300,000,000
	3	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	<i>- Laporan kegiatan sosialisasi kelitbangan - Laporan Harteknas</i>	219,999,400

	4	Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali	1 Dokumen	<i>Kajian/ Penelitian tentang Model Pelayanan Kesehatan Tradisional</i>	0
4		KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN				0
	1	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	<i>Kajian/ Penelitian tentang Pengembangan sistem dan data based riwayat kesehatan berbasis kecamatan</i>	0
	2	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	<i>Kajian/ Penelitian tentang Penerapan nilai - nilai kearifan lokal krama Bali pada sistem pembelajaran Pendidikan formal</i>	0
	3	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	<i>Kajian/ Penelitian tentang Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal</i>	0

BAB IV

RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2023 khususnya meliputi program/kegiatan/sub kegiatan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Provinsi Bali terdiri atas 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan. 1 (satu) Program dengan 6 (enam) kegiatan merupakan program pendukung pelaksanaan tupoksi yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan total anggaran sebesar Rp. 15.882.259.438 Sementara itu untuk Program Prioritas terdiri dari 1 (satu) Program dan 4 (empat) Kegiatan yaitu: Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan total anggaran sebesar Rp. 9.750.000.000. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan total anggaran sebesar Rp. 2.400.000.000. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang social dan Kependudukan sebesar Rp.925.000.000, dan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi total anggaran sebesar Rp.1.145.934.620, sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

Rencana kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali meliputi rencana program dan kegiatan yang disusun berdasarkan skala prioritas untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Perumusan rencana program dan kegiatan pada tahap ini merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan prioritas program dan kegiatan OPD menurut Rancangan Akhir RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi.

Adapun rincian rencana kerja dan pendanaan pada tahun anggaran 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 Tabel 4.1 sebagai berikut TABEL 4.1

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.02.00 Badan Riset dan Inovasi Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.02.00 Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode	Uraian	Indikator Kinerja			Lokasi	Rencana Tahun 2023			Sumber	Target Capaian Kinerja 2024		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Tolak Ukur	Target				
						Pro	Keluaran								
5															
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	05							25.430.419.849				27.973.461.83			
5	05	01						14.502.772.549				15.953.049.80			
5	05	01	1.01					56.271.800				61.898.980			
5	05	01	1.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Dokumen	45.259.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah Jumlah	12 Dok	49.785.670

5	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		5 Laporan	11.012.100	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lap	12.113.310
5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.641.005.185				11.705.105.704
5	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		60 orang/bulan	10.624.746.285	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang/bulan	11.687.220.914
5	05	01	1.02	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		600 Dokumen	7.592.200	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dok	8.351.420
5	05	01	1.02	03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		5 Dokumen	5.199.600	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dok	5.719.560
5	05	01	1.02	04	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		1 Dokumen	3.467.100	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	1 Dok	3.813.810

							Lanjut Pemeriksaan							Pemeriksaan		
5	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				512.465.400				563.711.940
5	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		10 Paket	21.959.400	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	24.155.340
5	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		28 Paket	54.750.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	60.225.000
5	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		8 Paket	157.500.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	173.250.000

5	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		12 Paket	20.424.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	22.466.400
5	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		4 Dokumen	15.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dok	16.500.000
5	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		12 Laporan	242.832.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	267.115.200
5	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					552.180.000				607.398.000
5	05	01	1.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		3 Paket	15.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	16.500.000

5	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		4 Unit	537.180.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	590.898.000
5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				550.014.036				605.015.440
5	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		1 Laporan	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	0
5	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		12 Laporan	226.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	248.600.000

5	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		12 Laporan	324.014.036	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	356.415.440
5	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.190.836.128				2.409.919.741
5	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		10	837.232.032	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	920.955.235
5	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		5 Unit	1.353.604.096	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.488.964.506
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							10.927.647.300				12.020.412.030

5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							9.127.647.900				10.040.412.690
5	05	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Jembrana, Semua		6 Laporan			7.810.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	6 Lap		8.591.000.000

									Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Karangase m, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

5	05	02	1.01	06	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplemen tasikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Dok	0
5	05	02	1.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplemen tasikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;		2 Laporan	850.000.000		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	2 Lap	935.000.000

									Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
5	05	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Dokumen	379.335.600	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	7 Dok	417.269.160

									Kelurahan; Kab. Karangase m, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab.							
5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplemen tasikan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Gianyar, Semua Kecamatan,		5 Rekom	88.312.300	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	5 Rekom	97.143.530

								Semua Kelurahan; Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				950.000.000				1.045.000.000

5	05	02	1.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplemen tasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dok	0
5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplemen tasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Dokumen	150.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	6 Dok	165.000.000
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplemen tasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		1 Dokumen	500.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dok	550.000.000
5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplemen tasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	300.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dok	330.000.000

5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplemen tasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	0	Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dok	0
5	05	02	1.03	10	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Perhubungan	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplemen tasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dok	0
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				0				0
5	05	02	1.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplemen tasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		1 Dokumen	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dok	0
5	05	02	1.02	05	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplemen tasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		1 Dokumen	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dok	0

5	05	02	1.02	06	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplemen tasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		1 Dokumen	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dok	0
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi				849.999.400				934.999.340
5	05	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplemen tasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		1 Laporan	300.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Lap	330.000.000
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplemen tasikan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraa n Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		1 Laporan	219.999.400	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Lap	241.999.940
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplemen tasikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh		1 Laporan	330.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Lap	363.000.000

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rancangan Akhir Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Bali Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dilingkup Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Gubernur Bali yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Bali tahun 2018-2023 menuju Bali Era Baru.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek legalitas, kebersamaan dengan menampung berbagai masukan dari berbagai pihak utamanya stakeholders terkait, sehingga berhasil disusun dokumen perencanaan untuk satu tahun ke depan. Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi jajaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan demikian seluruh jajaran di Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali terikat akan dokumen perencanaan ini.

Optimalisasi pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali serta pencapaian target pada akhir periode RPJMD 2018 – 2023.

Dengan adanya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan, bersama seluruh organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023, memperhatikan kaidah–kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja induk tahun 2021.
- b. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
- c. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai
- d. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah, sebagai wujud nyata dan tanggung jawab Pemerintah dalam membangun daerah.

5.3 Tindak Lanjut

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023 yang akan dimanfaatkan oleh jajaran di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sendiri maupun stakeholder terkait yang berkepentingan. Rancangan Renja akan dipedomani sebagai alat kendali mulai dari proses perencanaan awal sampai dengan perencanaan akhir Rencana Kerja Tahun 2023.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 1009.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Sistem Peradilan Pidana, Perundang-Undahan, Acara, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 19211.
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan, Pengadilan dan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 41, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 2214 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan, Peradilan, Pengadilan, Lembaga Peradilan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2009.
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Umum Administrasi Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 241, Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 241, Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2072.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Saluran, Tata Lintas Perhubungan, Pengendalian dan Fasilitas Pelaksanaan Perantara Perhubungan Udara perhubungan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2071.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Umum Administrasi Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Umum Administrasi Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2072.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Umum Administrasi Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11, Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2007.

1. Penelitian Monev Dalam Regeri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Penyelidikan dan Penelitian Pembangunan Daerah, Tata Cara Penelitian Monev dan Penelitian Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Strategis Daerah, serta Tata Cara Penelitian Monev Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Aksi Pembangunan Daerah Serta Regeri Nomor 11/2018 tentang UU No. 11/2018
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Monev, Penelitian, dan Penyelidikan Pembangunan Daerah (Permen Dalam Negeri/2018 tentang UU No. 11/2018)
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2043 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 2, Terbitan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2)
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelidikan dan Penelitian Monev dan Penelitian Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 10, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelidikan dan Penelitian Monev dan Penelitian Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 2, Terbitan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2)
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 2)
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11)
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 (Peraturan Gubernur Bali Nomor 2)
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2021 (Peraturan Gubernur Bali Tahun 2018 Nomor 13)

19. Keputusan Menteri dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2022 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Cara Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Daerah Khusus Khusus Jakarta 2022
Nomor 10

MEMORANDUM

0000000

0000000

Memorandum Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas
Fungsi, Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Cara Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Provinsi dan Daerah Khusus Khusus Jakarta 2022, meliputi:
1. Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Susunan
Organisasi

0000000

Terdapat beberapa perubahan dalam susunan
organisasi sebagai berikut:

1. Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Susunan
Organisasi, meliputi:
a. Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Susunan
Organisasi, meliputi:
b. Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Susunan
Organisasi, meliputi:
c. Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Susunan
Organisasi, meliputi:
d. Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Susunan
Organisasi, meliputi:

0000000

Keputusan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2022

Keputusan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2022
Nomor 10

Keputusan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2022

Keputusan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2022
Nomor 10

Keputusan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2022

1. Keputusan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2022
2. Keputusan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2022
3. Keputusan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2022

Uraian

KEPUNYAIAN SIKAP KALAH MENYI DAN MENYALU TERHADAP KELOMPOK SAKIT

TANGGAL BERTAHAP 1 DAN PASCA UJIAN TERTAMA

KELOMPOK SAKIT DAN SIKAP SAKIT TERHADAP KELOMPOK SAKIT KELOMPOK BERSAMA SIKAP SAKIT SAKIT SAKIT KELOMPOK SAKIT DAN KELOMPOK SAKIT KELOMPOK SAKIT

Keputusan Manajemen Per. Untuk Perencanaan, Rencana, dan Pelaksanaan dan
Keputusan (untuk Perencanaan dan)

Perencanaan dan

Keputusan

Keputusan

1. Keputusan (untuk Perencanaan dan)
2. Keputusan (untuk Perencanaan dan)

3. Keputusan (untuk Perencanaan dan)

Keputusan

4. Keputusan (untuk Perencanaan dan)
5. Keputusan (untuk Perencanaan dan)
6. Keputusan (untuk Perencanaan dan)
7. Keputusan (untuk Perencanaan dan)
8. Keputusan (untuk Perencanaan dan)
9. Keputusan (untuk Perencanaan dan)
10. Keputusan (untuk Perencanaan dan)
11. Keputusan (untuk Perencanaan dan)
12. Keputusan (untuk Perencanaan dan)
13. Keputusan (untuk Perencanaan dan)
14. Keputusan (untuk Perencanaan dan)
15. Keputusan (untuk Perencanaan dan)
16. Keputusan (untuk Perencanaan dan)

17.	Non-Resident Individuals (Other Than Resident)	10%	Resident Individuals
18.	Non-Resident Corporate Taxpayers Not Exempt	10%	Corporate
19.	Corporate (See Reg. Section 201)	10%	Corporate

NET STATE INCOME



Source: New Jersey Department of Treasury, Division of Taxation, "New Jersey Tax Statistics," 2001.